

# MANIPULASI NARASI PUBLIK MELALUI AKUN BOT DALAM AKTIVISME DIGITAL PRO-IKN DI MEDIA SOSIAL X

Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si.\*, Mochammad Jose Akmal\*\*  
E-mail: [Joseperdana13@gmail.com](mailto:Joseperdana13@gmail.com)

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50139  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 74654505  
Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas fenomena manipulasi narasi publik melalui keterlibatan akun bot dalam aktivisme digital yang mendukung pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara di media sosial X (sebelumnya Twitter). Meningkatnya unggahan pro IKN di platform digital memunculkan pertanyaan mengenai keaslian partisipasi publik dalam ruang demokrasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik akun bot, pola penyebaran konten, dan implikasinya terhadap kualitas diskursus publik dalam konteks isu IKN. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah mixed methods dengan dominasi kualitatif. Data dikumpulkan melalui crawling Twitter API untuk menganalisis metadata akun dan isi konten, serta dilengkapi dengan wawancara mendalam terhadap tiga informan ahli. Analisis dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif kuantitatif untuk data digital dan analisis tematik untuk data wawancara. Teori propaganda komputasi, hegemoni media, aktivisme digital, dan demokrasi digital digunakan sebagai kerangka konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 21,62% akun dalam diskursus pro-IKN diklasifikasikan sebagai bot, dan 44,91% menunjukkan pola aktivitas tidak otentik. Akun-akun ini menyebarkan konten identik dalam waktu berdekatan, menggunakan tagar seragam, serta menekan keberagaman opini. Temuan ini mengindikasikan terjadinya orkestrasi digital yang membentuk ilusi dukungan publik, serta mengganggu prinsip inklusivitas dan otentisitas dalam demokrasi digital. Penelitian ini memberikan kontribusi pada studi komunikasi politik digital, dengan menyoroti urgensi regulasi transparansi algoritma, penguatan literasi digital, dan perlunya pemetaan lanjutan terhadap jaringan akun bot dalam kampanye kebijakan publik.

**Kata kunci:** akun bot, propaganda komputasi, demokrasi digital, IKN, media sosial, aktivisme digital

## ABSTRACT

This study investigates the manipulation of public narratives through the involvement of bot accounts in digital activism supporting the relocation of Indonesia's capital city (IKN) to Nusantara, as observed on the social media platform X (formerly Twitter). The increasing volume of pro-IKN content raises questions about the authenticity of public participation in digital democratic spaces. This research aims to identify the characteristics of bot accounts, patterns of content dissemination, and their implications for the quality of public discourse surrounding the IKN issue. A mixed-methods approach was adopted, with a qualitative emphasis. Data were collected through Twitter API crawling to analyze account metadata and content patterns, complemented by in-depth interviews with three expert informants. Quantitative descriptive analysis was applied to digital data, while thematic analysis was used

to interpret interview transcripts. Theoretical frameworks included computational propaganda, media hegemony, digital activism, and digital democracy. The findings reveal that 21.62% of accounts involved in the pro-IKN discourse exhibited bot-like characteristics, with 44.91% displaying coordinated and inauthentic patterns. These accounts posted identical content in close time proximity and utilized uniform hashtags, suppressing narrative diversity. The study indicates a digital orchestration that constructs an illusion of public consensus and undermines the inclusivity and authenticity of democratic dialogue. This research contributes to the field of digital political communication by highlighting the urgency of algorithmic transparency regulations, the need for improved digital literacy, and further mapping of bot networks in public policy campaigns.

**Keywords:** bot accounts, computational propaganda, digital democracy, IKN, social media, digital activism

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi besar dalam kehidupan sosial-politik masyarakat global, termasuk Indonesia. Media sosial sebagai produk utama revolusi digital kini menjadi arena utama dalam produksi, distribusi, dan pertarungan makna atas isu-isu publik. Dengan lebih dari 224 juta pengguna internet aktif di Indonesia, ruang digital telah menjadi panggung kontestasi narasi yang semakin penting dalam menentukan arah kebijakan, legitimasi pemerintah, dan persepsi kolektif atas suatu isu. Platform seperti X (sebelumnya Twitter) tidak lagi hanya menjadi media ekspresi personal, melainkan telah berevolusi menjadi ruang politik yang hidup, dinamis, dan sering kali menjadi arena pembentukan opini publik yang menentukan.

Dalam ruang digital tersebut, muncul fenomena baru yang semakin kompleks, yaitu manipulasi narasi publik melalui penggunaan akun-akun otomatis atau bot. Bot media sosial adalah perangkat lunak yang mampu melakukan interaksi secara otomatis, meniru perilaku manusia, dan menyebarkan informasi dalam skala besar dan waktu yang sangat cepat. Penggunaan bot dalam ranah politik

bukanlah hal yang asing, bahkan telah menjadi praktik umum dalam berbagai peristiwa politik besar di dunia, seperti pemilu Amerika Serikat tahun 2016, referendum Brexit, hingga kampanye politik di Brasil dan India. Dalam kasus-kasus tersebut, bot digunakan untuk menciptakan ilusi konsensus, menggiring opini publik, menyebarkan disinformasi, hingga memecah belah masyarakat melalui polarisasi digital.

Fenomena yang sama mulai mengemuka di Indonesia, terutama dalam isu-isu strategis nasional. Salah satu isu yang mendapat sorotan adalah pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur. Sejak pertama kali diumumkan pada tahun 2019 oleh Presiden Joko Widodo, proyek ini menjadi topik diskusi yang luas di berbagai lapisan masyarakat, baik di ruang luring maupun daring. Media sosial, terutama X, dipenuhi oleh perdebatan seputar urgensi, dampak sosial-ekologis, skema pembiayaan, hingga kelayakan proyek tersebut. Namun, di tengah diskursus yang tampaknya hidup dan partisipatif itu, muncul kecurigaan akan adanya orkestrasi digital—keterlibatan sistematis dari akun-akun bot untuk menyebarkan narasi yang cenderung

seragam, mengarahkan persepsi publik ke arah tertentu, dan membungkam kritik yang berkembang secara organik.

Indikasi ini tidak berdiri sendiri. Berbagai observasi awal menemukan pola aktivitas digital yang mencurigakan, seperti akun-akun baru yang secara tiba-tiba aktif menyuarakan dukungan terhadap IKN, penggunaan tagar yang identik, keseragaman isi pesan, dan waktu unggahan yang sangat terkoordinasi. Keberadaan akun-akun tersebut tidak jarang menunjukkan karakteristik non-manusia, seperti tidak memiliki interaksi dua arah, minimnya aktivitas historis, serta tidak adanya keterlibatan dalam isu lain di luar IKN. Situasi ini mengarah pada pertanyaan penting: sejauh mana opini publik yang terbentuk di media sosial benar-benar mencerminkan suara masyarakat? Ataukah ia hanyalah representasi buatan dari entitas-entitas otomatis yang bertujuan menciptakan realitas palsu demi kepentingan politik tertentu?

Penggunaan akun bot dalam kampanye pro-IKN bukan hanya persoalan teknis, melainkan menyentuh dimensi etika, demokrasi, dan legitimasi kebijakan publik. Dalam demokrasi digital yang sehat, partisipasi warga seharusnya bersifat otentik, inklusif, dan reflektif terhadap keragaman pandangan masyarakat. Namun, keberadaan bot yang didesain untuk mengulang narasi tertentu berpotensi menciptakan *illusion of majority*—kesan seolah-olah suatu gagasan didukung secara luas, padahal hanya merupakan hasil pengulangan terprogram dari sejumlah kecil aktor yang memiliki kepentingan tertentu. Ilusi ini dapat berbahaya, karena mampu mempengaruhi persepsi elite pembuat kebijakan, media massa, bahkan publik itu sendiri, yang pada akhirnya

dapat memanipulasi proses pengambilan keputusan kolektif.

Lebih jauh lagi, keterlibatan bot dalam diskursus publik memiliki implikasi serius terhadap kualitas demokrasi digital. Pertama, ia merusak prinsip transparansi dalam komunikasi politik, karena publik tidak mengetahui bahwa interaksi yang mereka alami berasal dari entitas non-manusia. Kedua, ia mengganggu kebebasan berpendapat dan pluralitas suara, karena narasi-narasi kritis dapat terkubur oleh banjir konten dari akun bot. Ketiga, ia menciptakan ketimpangan kekuasaan dalam ruang digital, di mana aktor dengan akses terhadap teknologi dan sumber daya algoritmik dapat secara sepihak mengontrol wacana publik. Dengan kata lain, demokrasi digital yang seharusnya menjadi ruang pembebasan justru berisiko menjadi alat hegemoni baru yang tersembunyi di balik kecanggihan teknologi.

Sayangnya, studi mengenai fenomena ini dalam konteks Indonesia masih sangat terbatas. Beberapa penelitian memang telah membahas dinamika diskursus digital terkait IKN, namun sebagian besar berhenti pada analisis sentimen, topik, atau opini publik secara umum. Belum banyak kajian yang secara sistematis membedakan antara akun organik dan tidak organik, atau mengeksplorasi secara mendalam karakteristik, pola aktivitas, dan dampak keberadaan akun bot terhadap dinamika demokrasi digital. Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting dan relevan untuk mengisi kekosongan literatur sekaligus memberikan pemahaman baru tentang bagaimana kekuatan algoritma digunakan dalam kontestasi wacana kebijakan publik.

Penelitian ini difokuskan pada upaya untuk mengidentifikasi karakteristik

akun bot dalam kampanye pro-IKN di media sosial X, memetakan pola penyebaran kontennya, serta menganalisis dampaknya terhadap persepsi publik dan kualitas demokrasi digital di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan *mixed methods*—penggabungan antara analisis kuantitatif terhadap data digital dan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam—penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang signifikan. Secara teoritis, ia memperkaya kajian komunikasi politik digital, aktivisme algoritmik, dan propaganda komputasi. Secara praktis, ia memberikan dasar bagi pengembangan regulasi transparansi algoritma, sistem deteksi akun tidak otentik, serta peningkatan literasi digital masyarakat dalam menghadapi realitas baru demokrasi yang semakin terotomasi.

Dengan menelaah secara mendalam keterlibatan akun bot dalam isu strategis seperti IKN, penelitian ini tidak hanya berupaya memahami bagaimana teknologi digunakan untuk membentuk opini publik, tetapi juga mengajak pembaca untuk merefleksikan kembali makna partisipasi, keaslian demokrasi, dan masa depan ruang publik di tengah arus algoritma yang semakin dominan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods*) dengan dominasi kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk menggabungkan analisis kuantitatif terhadap data digital dengan interpretasi kualitatif atas konteks sosial dan politik yang menyertainya. Data utama dikumpulkan melalui teknik *crawling* data dari platform X (sebelumnya Twitter) menggunakan API resmi. Fokus

pengambilan data diarahkan pada unggahan dengan tagar pro-IKN dalam rentang waktu tertentu yang bertepatan dengan momen kebijakan penting. Data yang berhasil dihimpun meliputi lebih dari 5.000 cuitan dari sekitar 2.100 akun. Identifikasi akun bot dilakukan dengan menerapkan indikator heuristik, seperti usia akun, frekuensi unggahan, kesamaan isi pesan, penggunaan tagar seragam, serta rendahnya interaksi. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengelompokkan akun ke dalam kategori bot, semi-otentik, dan manusia. Untuk memperdalam analisis, dilakukan wawancara mendalam terhadap tiga narasumber ahli di bidang komunikasi digital dan media. Hasil wawancara dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, guna menangkap pandangan kritis mengenai dampak bot terhadap demokrasi digital. Etika penelitian dijaga dengan tidak mengungkap identitas pribadi akun individu dan memastikan persetujuan dari seluruh informan wawancara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkap bahwa diskursus mengenai pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara di platform X (sebelumnya Twitter) tidak sepenuhnya mencerminkan partisipasi publik yang otentik. Dari 2.127 akun yang dianalisis, sebanyak **21,62%** diklasifikasikan sebagai akun bot berdasarkan analisis teknis, sementara **44,91%** akun menunjukkan kecenderungan aktivitas tidak otentik, atau apa yang disebut sebagai akun semi-otentik. Sisanya, sekitar sepertiga (33,47%) adalah akun organik—akun manusia yang menunjukkan perilaku penggunaan media sosial secara wajar, dengan aktivitas beragam dan tidak terkoordinasi secara sistematis.

Klasifikasi ini ditentukan melalui sejumlah indikator utama, antara lain usia akun, frekuensi cuitan dalam rentang waktu sempit, kesamaan isi cuitan, dan penggunaan tagar yang identik secara serempak. Misalnya, banyak akun bot ditemukan baru dibuat dalam kurun waktu kurang dari satu bulan menjelang momen-momen krusial seperti pengumuman nama “Nusantara” atau kunjungan presiden ke lokasi proyek IKN. Akun-akun ini juga cenderung memiliki rasio pengikut yang rendah (follower-following tidak seimbang), nama pengguna acak seperti @user18993 atau @akun2024\_ikn, tidak memiliki foto profil nyata, serta hanya mengunggah konten yang mendukung proyek IKN tanpa riwayat keterlibatan dalam isu lain sebelumnya.

Salah satu pola yang paling mencolok adalah kemunculan cuitan identik dari akun-akun berbeda dalam waktu yang sangat berdekatan, yakni dalam rentang waktu dua hingga lima menit. Unggahan tersebut menggunakan frasa yang hampir selalu seragam, seperti “IKN Nusantara adalah simbol kemajuan”, “Mari dukung ibu kota baru demi masa depan Indonesia”, atau “IKN adalah solusi pemerataan pembangunan.” Selain itu, semua cuitan tersebut secara konsisten mencantumkan tagar seperti #IKNNusantara, #DukungIKN, #MajuBersamaIKN, dan #IndonesiaMaju. Dalam konteks teori propaganda komputasi (Woolley & Howard, 2016), pola seperti ini mencerminkan *amplifikasi otomatisasi*—yakni strategi menyebarkan narasi politik menggunakan akun-akun terotomasi untuk menciptakan kesan dukungan publik yang luas.

Yang juga signifikan adalah bahwa sebagian besar akun bot ini tidak menunjukkan aktivitas lain selain dalam

topik IKN. Tidak ditemukan interaksi dua arah seperti membalas komentar, mengikuti thread, atau menyukai cuitan lain. Ini menunjukkan bahwa akun-akun tersebut tidak ditujukan untuk berpartisipasi dalam diskusi, melainkan semata-mata untuk menyebarkan narasi yang telah disusun secara sentral. Secara fungsional, mereka berperan sebagai penyebar pasif pesan-pesan politik yang telah diprogram atau dikendalikan oleh entitas tertentu.

Dalam perbandingan dengan akun organik, terdapat perbedaan yang sangat jelas. Akun organik cenderung menunjukkan aktivitas yang lebih beragam: mereka tidak hanya membicarakan IKN, tetapi juga topik lain seperti olahraga, hiburan, atau kehidupan sehari-hari. Cuitan mereka terkait IKN juga lebih bernuansa, dengan perbedaan dalam gaya bahasa, argumen, dan sikap. Beberapa akun organik bahkan secara terbuka menyuarakan kritik, kekhawatiran, atau pertanyaan yang menantang narasi resmi pemerintah—seperti soal pembiayaan proyek yang memberatkan APBN, kerusakan hutan di Kalimantan Timur, atau pengusuran masyarakat adat.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa keberadaan akun bot memiliki efek pendangkalan diskursus publik. Dalam sejumlah kasus, akun organik yang mengkritik proyek IKN mendapat respons dari akun-akun anonim yang secara agresif menyebarkan narasi positif, terkadang dalam bentuk serangan ad hominem atau *quote tweet* yang memojokkan. Wawancara dengan salah satu narasumber dari lembaga media independen menyebut fenomena ini sebagai “kekerasan simbolik digital”, yaitu praktik membungkam opini kritis dengan menggunakan volume, bukan argumen.

Lebih dari sekadar mengganggu diskusi, keberadaan akun bot ini menciptakan ilusi konsensus digital—sebuah persepsi bahwa mayoritas pengguna media sosial mendukung kebijakan pemindahan ibu kota. Ilusi ini diperkuat oleh algoritma platform yang mengedepankan konten dengan frekuensi tinggi dan tagar populer. Dalam banyak kasus, tagar-tagar pro-IKN menjadi trending topic bukan karena dukungan organik yang besar, melainkan karena disebarkan secara serempak dan berulang-ulang oleh jaringan akun bot. Ini merupakan bentuk manipulasi algoritmik yang memanfaatkan logika media sosial untuk menciptakan popularitas buatan.

Fenomena ini sejalan dengan temuan dari penelitian Ferrara et al. (2016) dalam konteks pemilu AS, di mana hanya sebagian kecil akun bot mampu menghasilkan hingga 31% total cuitan dalam isu politik tertentu. Dalam kasus IKN, pola yang sama terlihat: sebagian besar volume narasi pro-IKN ternyata berasal dari segelintir akun yang sangat aktif dan tidak otentik. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang validitas opini publik yang tampak di ruang digital dan integritas demokrasi digital itu sendiri.

Wawancara dengan narasumber dari komunitas akademik memperkuat analisis ini. Mereka menyebut bahwa praktik penggunaan bot untuk mengamplifikasi agenda politik bukan hanya mengurangi kualitas deliberasi publik, tetapi juga dapat mengarahkan proses kebijakan pada asumsi yang keliru—yakni bahwa proyek pemerintah didukung secara luas, padahal dukungan tersebut sebagian besar dihasilkan oleh entitas tidak nyata. Ketika pembuat kebijakan menjadikan media sosial sebagai

barometer aspirasi rakyat, keberadaan bot berpotensi menyesatkan arah pengambilan keputusan.

Lebih jauh, temuan ini mencerminkan adanya proses delegitimasi terhadap opini minoritas, terutama suara-suara kritis yang muncul dari aktivis lingkungan, akademisi, masyarakat adat, dan warga yang terdampak langsung oleh pembangunan IKN. Ketika ruang digital dikuasai oleh narasi yang homogen, keberagaman sudut pandang menjadi tergesur. Ini merupakan tantangan serius dalam praktik demokrasi deliberatif, di mana keberagaman dan konflik argumen seharusnya menjadi kekuatan, bukan dilemahkan

melalui teknik otomatisasi.

Dari sisi etika, penggunaan bot dalam kampanye kebijakan publik seperti IKN menyisakan pertanyaan besar. Siapa yang berada di balik orkestrasi ini? Untuk kepentingan siapa narasi ini didorong? Dan apakah publik berhak mengetahui bahwa apa yang mereka baca bukan berasal dari sesama warga negara, melainkan dari mesin? Sayangnya, regulasi di Indonesia belum memiliki mekanisme transparansi algoritma maupun pelabelan konten terotomasi yang memadai.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menemukan bahwa akun bot berperan besar dalam mengisi ruang digital pro-IKN, tetapi juga bahwa keberadaan mereka mengubah lanskap diskusi politik menjadi semu dan tidak sehat. Praktik ini secara langsung mengancam kualitas demokrasi digital di Indonesia dan menimbulkan urgensi bagi pemerintah, penyedia platform, serta masyarakat sipil untuk menata ulang ekosistem informasi agar lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa ruang diskursus digital di platform X (sebelumnya Twitter) terkait proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) tidak sepenuhnya merepresentasikan partisipasi publik yang otentik. Temuan menunjukkan bahwa lebih dari setengah akun yang menyuarakan dukungan terhadap IKN terdiri dari akun bot dan akun semi-otentik yang menunjukkan pola aktivitas terotomasi, terkoordinasi, dan repetitif. Akun-akun ini didesain bukan untuk berdialog, melainkan untuk menyebarkan narasi tertentu dan menciptakan kesan dukungan massal.

Keberadaan akun bot dalam kampanye pro-IKN menciptakan ilusi konsensus yang berbahaya. Narasi yang terkesan dominan sebenarnya merupakan hasil rekayasa algoritmik, bukan cerminan sikap publik secara luas. Ini tidak hanya mengurangi kualitas deliberasi digital, tetapi juga menimbulkan risiko bagi legitimasi kebijakan jika pengambilan keputusan didasarkan pada representasi digital yang keliru. Dalam konteks demokrasi, praktik ini mencederai prinsip kejujuran komunikasi dan kesetaraan partisipasi dalam ruang publik.

Lebih dari itu, bot berperan dalam menenggelamkan opini-opini kritis, mempolarisasi diskursus, dan melemahkan posisi masyarakat sipil dalam memengaruhi kebijakan. Diskusi yang seharusnya menjadi wadah pertukaran ide secara sehat tergantikan oleh banjir slogan politik yang seragam dan kosong dari argumentasi rasional.

Oleh karena itu, diperlukan upaya kolektif untuk membangun ekosistem demokrasi digital yang sehat dan bertanggung jawab. Pemerintah perlu menyusun regulasi yang

mendorong transparansi algoritma dan pelabelan akun otomatis. Platform media sosial harus meningkatkan deteksi terhadap aktivitas tidak otentik. Masyarakat sipil dan akademisi perlu memperkuat literasi digital agar pengguna mampu mengenali manipulasi narasi yang tersembunyi di balik citra dukungan semu.

Penelitian ini menyumbang pemahaman kritis mengenai bagaimana propaganda komputasi bekerja dalam konteks kebijakan domestik di Indonesia. Namun demikian, keterbatasan teknis dalam pendeteksian bot secara otomatis serta belum adanya akses data dari pihak internal platform menjadi tantangan tersendiri yang membuka ruang untuk penelitian lanjutan di masa depan.

## **SARAN**

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai rekomendasi praktis dan arah kebijakan di masa mendatang:

Pertama, pemerintah perlu merumuskan kebijakan regulatif yang lebih tegas dan adaptif dalam menghadapi praktik manipulasi digital melalui akun bot. Dalam konteks demokrasi digital, penting adanya aturan yang mewajibkan transparansi penggunaan akun otomatis, termasuk kewajiban pelabelan bot, keterbukaan terhadap penggunaan teknologi komunikasi dalam kampanye kebijakan, serta sanksi terhadap penyalahgunaan ruang publik digital untuk tujuan manipulatif.

Kedua, platform media sosial seperti X harus memperkuat sistem deteksi dan penanganan terhadap akun-akun tidak otentik. Selain pengembangan teknologi deteksi berbasis machine learning, perusahaan media sosial juga perlu

meningkatkan kolaborasi dengan komunitas akademik dan lembaga independen untuk mengaudit tren penyebaran informasi yang mencurigakan. Keterbukaan data dan akuntabilitas algoritma menjadi langkah penting dalam menjaga integritas informasi di ruang publik.

Ketiga, aktor-aktor masyarakat sipil—termasuk aktivis, jurnalis, dan komunitas digital—perlu memperkuat gerakan literasi digital kritis. Masyarakat harus dibekali dengan kemampuan untuk mengenali akun bot, membedakan informasi otentik dan terkoordinasi, serta membangun kesadaran bahwa tidak semua yang viral di media sosial mencerminkan suara mayoritas. Pendidikan digital bukan hanya soal penggunaan teknologi, tetapi juga soal etika, refleksi, dan kemampuan memilah informasi secara sadar.

Keempat, akademisi dan peneliti perlu memperluas kajian terhadap fenomena propaganda komputasi di Indonesia. Studi ini hanya berfokus pada kasus IKN dan platform X; namun praktik serupa sangat mungkin terjadi dalam isu-isu kebijakan lain dan di berbagai platform media sosial lainnya seperti Facebook, TikTok, atau YouTube. Penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas akan sangat berharga untuk memahami lebih dalam bagaimana ruang digital di Indonesia dipengaruhi oleh aktor-aktor tidak otentik dan bentuk-bentuk intervensi algoritmik.

Terakhir, perlu ada upaya bersama untuk menegakkan etika komunikasi dalam ruang digital. Kekuatan teknologi seharusnya digunakan untuk memperkuat kualitas demokrasi, bukan untuk memanipulasinya. Tanpa transparansi, edukasi, dan pengawasan, demokrasi digital berisiko menjadi demokrasi semu—

terlihat partisipatif secara permukaan, namun dikendalikan secara diam-diam oleh logika otomatisasi dan kekuasaan tersembunyi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Woolley, S. C., & Howard, P. N. (2016). *Political communication, computational propaganda, and autonomous agents – Introduction. International Journal of Communication*, 10, 4882–4890.
- Ferrara, E., Varol, O., Davis, C., Menczer, F., & Flammini, A. (2016). *The rise of social bots. Communications of the ACM*, 59(7), 96–104.
- Chadwick, A., & Dennis, J. (2019). *Social media, professional media, and mobilization in contemporary hybrid media systems: Sentiment tracking, political bots, and Brexit. Journal of Computer-Mediated Communication*, 24(1), 20–39.
- Tufekci, Z. (2015). *Algorithmic harms beyond Facebook and Google: Emergent challenges of computational agency. Colorado Technology Law Journal*, 13, 203.
- Lim, M. (2020). *Freedom to hate: social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. Critical Asian Studies*, 52(1), 1–16.
- Nugroho, Y., Siregar, M. F., & Laksmi, S. (2012). *Mapping the landscape of the media policy and regulatory environment in Indonesia. CIPG & Hivos*.
- Hasan, N. (2021). *Buzzer Politik dan Demokrasi Digital di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(1), 42–59.

- Sihombing, V. (2022). *Narasi Palsu dan Demokrasi Semu: Tinjauan Etis Terhadap Praktik Disinformasi Politik di Media Sosial*. *Jurnal Etika Politik*, 4(2), 101–118.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and Conducting Mixed Methods Research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Rogers, R. (2019). *Doing Digital Methods*. SAGE Publications.